



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2004-2013**

**THE ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCED POVERTY LEVEL IN  
SIDOARJO REGENCY IN 2004 – 2013**

**SKRIPSI**

Oleh

**Fahmi Rahmad Dani  
NIM 110810101106**

**JURUSAN ILMU EKONOMI dan STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2004 - 2013**

**THE ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCED POVERTY LEVEL IN  
SIDOARJO REGENCY IN 2004 – 2013**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Fahmi Rahmad Dani**  
**NIM 110810101106**

**JURUSAN ILMU EKONOMI dan STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER-FAKULTAS EKONOMI**

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Fahmi Rahmad Dani  
NIM : 110810101106  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan  
Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2013

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta tersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2015

Yang menyatakan,

Materai

Fahmi Rahmad Dani  
NIM. 110810101106

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2004-2013

Nama Mahasiswa : Fahmi Rahmad Dani

NIM : 110810101106

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Disetujui Tanggal : 10 Februari 2015

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Drs. Achmad Qosjim M.P  
NIP 195212101981031005

Fivien Muslihatinningsih SE., M.Si  
NIP 198301162008122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan  
Studi Pembangunan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes  
NIP 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2004-2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Fahmi Rahmad Dani

NIM : 110810101106

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

.....

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. Siti Komariyah. SE, M.Si** : .....  
NIP. 19710610 200 112 2 002
2. Anggota : **Dr. Moh. Adenan M.M.** : .....  
NIP. 19661031 19 9203 1 001
3. Anggota : **Drs. Petrus Edi Suswandi M.P.** : .....  
NIP. 19550425 198503 1 001

**FOTO**

**4 x 6**

**cm**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

**Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.**  
NIP. 19630614 199002 1 001

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan merendahkan hati dan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang kuucapkan rasa syukurku yang begitu dalam atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas terselesaikannya skripsi ini. Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

1. Ibunda Munziah Rufaidah dan Ayahanda Khoirul Anwar yang tercinta yang selalu memberikan doa, bimbingan, motivasi serta semangat;
2. Adikku tersayang Anang Fachrudin dan Silvi Nur Qolby yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta keluarga besar lainnya.
3. Bapak/Ibu guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

"Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan (Nabi Muhammad SAW)"\*

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.

(Tom Bodett)\*\*

Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan “ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “

( TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid )\*\*\*

## RINGKASAN

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2013;** Fahmi Rahmad Dani, 110810101106, 2015 ; 68 Halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Keberhasilan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan keberhasilan utama dalam instrumen pembangunan. Pemerintah pusat telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 tertuang sembilan agenda utama pembangunan, di mana pada *point* ke dua adalah memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. Urgensitas masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tergambar dari sembilan isu strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo mulai dari periode waktu 2004-2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory research*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari sumber yang terkait dengan variabel penelitian. Alat analisis data menggunakan uji asumsi klasik, deskriptif statistik, dan analisis regresi linear berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu PDRB, UMK, Pengangguran dan Inflasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif; 2)UMK berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif; 3) Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif; 4) Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah negative; 5) PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.



## Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo mulai dari periode waktu 2004-2013. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *Explanatory Research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber. Jumlah data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak sepuluh tahun. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu PDRB, UMK, Pengangguran dan Inflasi. Alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif; 2)UMK berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif; 3) Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif; 4) Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah negative; 5) PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Kemiskinan, PDRB, UMK, Pengangguran, Inflasi

## *Abstract*

This research entitle “THE ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCED POVERTY LEVEL IN SIDOARJO REGENCY IN 2004 – 2013.” The purpose of this research is to analyzed some factors that influenced poverty level in Sidoarjo regency since 2004-2013 period. The method that was used in this research was explanatory research. The date that was used in this research was secondary data that got from some sources. The quantity data that was taken in this research was about ten years. Variable that was used in this research was four variables, they are: PDRB, UMK, unemployment, and inflation. The analysis instrument that was used was *regresi linear berganda*. The results of this research showed that: 1) PDRB was positively influential to poverty level in Sidoarjo regency. 2) UMK was positively influential to poverty level in Sidoarjo regency. 3) Unemployment was positively influential to poverty level in Sidoarjo regency. 4) inflation was negatively influential to poverty level in Sidoarjo regency. 5) PDRB, UMK, Unemployment, and Inflation were influential to poverty in Sidoarjo regency.

Key words: Poverty, PDRB, UMK, Unemployment, and inflation.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 -1013”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Achmad Qosjim M.P, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Fivien Muslihatinningsih SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan dorongan semangat, saran, bimbingan serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
2. Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes, selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa kuliah.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Kedua orang tuaku tercinta dan Ibunda Munziah Rufaida dan Ayahanda Khoirul Anwar yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, nasihat serta bimbingan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua adikku tercinta Anang Fachrudin dan Silvi Nur Qolby yang telah memberikan dukungan serta doa.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Dewi Kurniawati yang telah memberikan semangat, meluangkan waktu setiap hari, menemani dalam canda tawa ataupun kesedihan selama masa kuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember angkatan 2011, terutama untuk teman-teman dan sahabat terbaikku, Dian Adidaya Amansyah, Rofiul Huda, Setyo Tri Yudhiarso, Dany Kusuma Putra, Desta Febrian Pribadi, Teguh Novriyanto, Nurdiansyah Sudrajat, Eka Dewi Aryani yang memebrikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa kuliah dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga besar lingkungan masjid At-Taqwa Jalan Sumatra, Ustadz Hamim, Pak Bagus, Ustadz Daylani, Mas Freddy yang telah memberikan dukungan, pembelajaran, serta bagaimana menghadapi hidup yang sesuai dengan perintah Islam.
12. Kepala Bankesbangpol Provinsi Jawa Timur, Bupati Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bankesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Kepala Disnaker Kabupaten Sidoarjo, Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo, dan Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo yang telah memebrikan informasi dan dukungan dalam penyelsaian skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan untuk kedepannya.

Jember, 30 Januari 2015

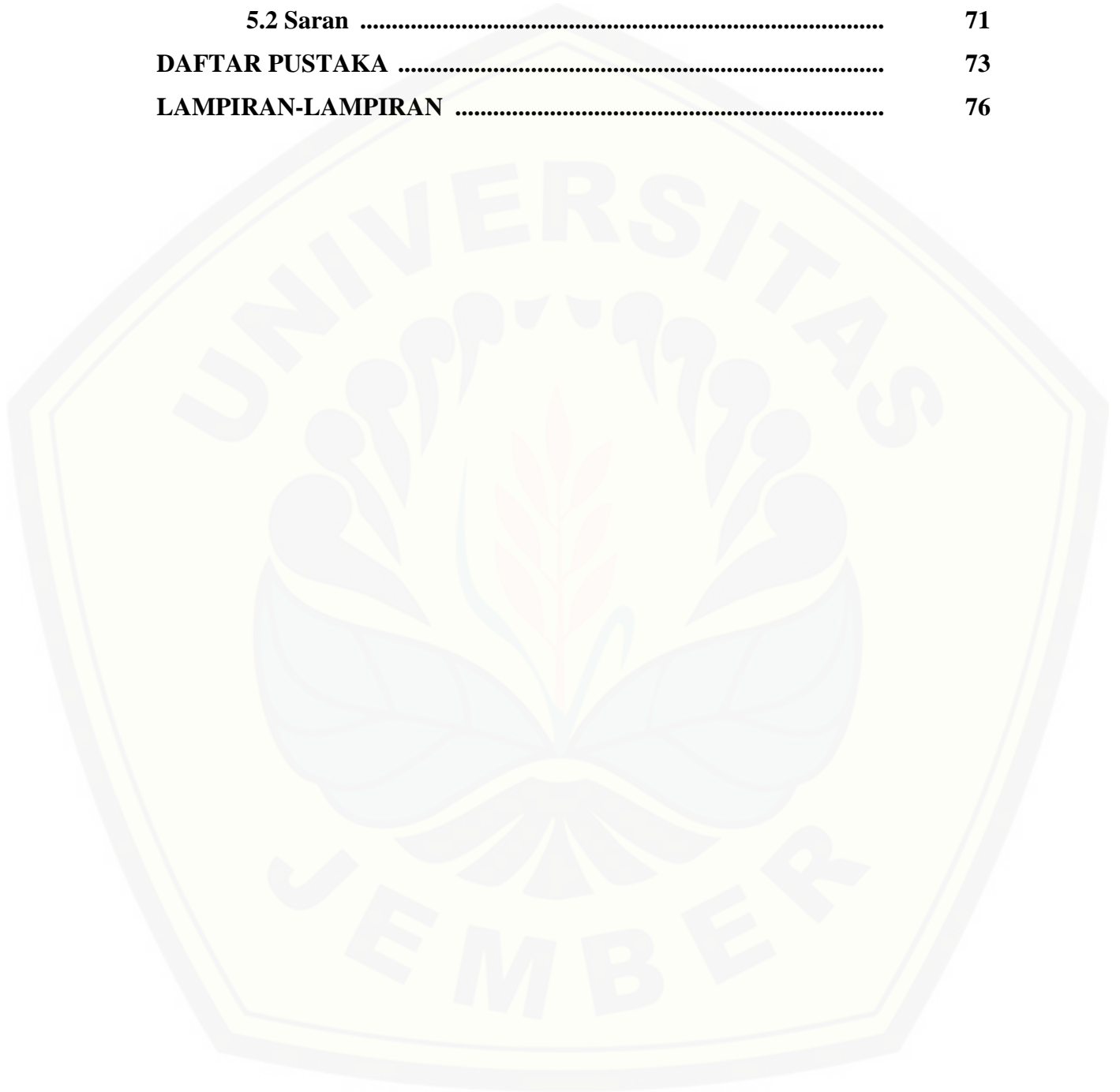
Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>9</b>
2.1.1 Teori Kemiskinan .....	<b>9</b>
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	<b>17</b>
<b>2.1.3 Upah Minimum Kabupaten</b> .....	<b>20</b>
2.1.4 Pengangguran .....	<b>25</b>
2.1.5 Inflasi .....	<b>28</b>
<b>2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya</b> .....	<b>30</b>

2.3 Kerangka Konseptual .....	35
2.4 Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian .....	38
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5 Identifikasi Variabel.....	39
3.6 Metode Analisis Data .....	39
3.6.1 Uji Asumsi Klasik .....	39
3.6.2 Analisis Deskriptif Statistik.....	41
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
3.6.4 Uji Hipotesis .....	42
3.7 Definisi Operasional.....	44
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah .....	46
<b>BAB 4. HASIL DAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	48
4.1.2 Profil Kabupaten Sidoarjo .....	49
4.1.3 Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	49
4.1.4 Analisis Data.....	56
4.2 Pembahasan .....	64
4.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	64
4.2.2 Pengaruh UMK Terhadap Tingkat Kemiskinan .....	66
4.2.3 Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan .....	67
4.2.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat	

Kemiskinan .....	69
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
1.1 Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin tahun 2009-2012 .....	4
1.2 PDRB Tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo .....	6
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	33
4.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo .....	50
4.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan.....	51
4.3 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo .....	52
4.4 Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Sidoarjo.....	54
4.5 Infasi Kabupaten Sidoarjo.....	55
4.6 Hasil Uji Normalitas .....	56
4.7 Uji Multikolinearitas .....	58
4.8 Uji Autokorelasi .....	59
4.9 Analisis Deskriptif Statistik .....	60
4.10 Hasil Regresi Linear Berganda .....	61

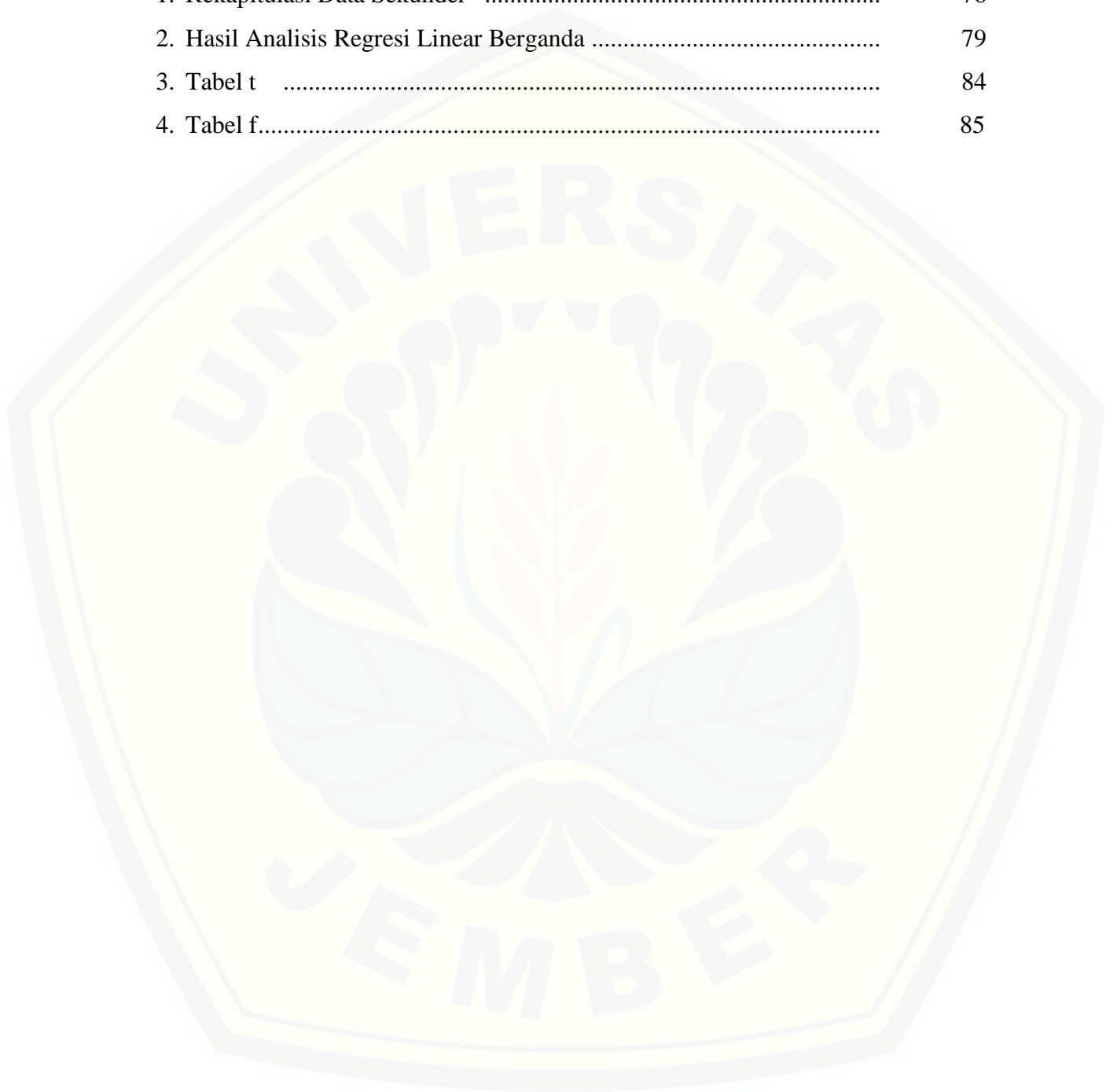


**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
2.1 Perangkat Kemiskinan.....	11
2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan dari Sisi <i>Demand</i> .....	15
2.3 Lingkaran Setan Kemiskinan dari Sisi <i>Supply</i> .....	15
2.4 Kerangka Berpikir.....	36
2.5 Kerangka Konseptual.....	37
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	46
4.1 Hasil Uji Normalitas Model.....	57
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	59

**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
1. Rekapitulasi Data Sekunder .....	76
2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	79
3. Tabel t .....	84
4. Tabel f.....	85



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dari segi jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan akan berkembang. Selain itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja serta pendidikan terampil yang mereka miliki (Sukirno, 2008:9).

Pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan dalam mengukur perkembangan perekonomian di negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, fokus permasalahan bukan hanya pada masalah perkembangan pendapatan secara riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi, dan masalah pemerataan pendapatan. Dalam pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita (Sukirno, 2008:423).

Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya secara keseluruhan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital ataupun modal

maupun sumber daya lainnya yang berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pada hakekatnya pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Ketiganya mengisi fungsi dan peran masing-masing dalam mengisi pembangunan (Saragih, 2009).

Tujuan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan.

Tujuan selanjutnya dari adanya pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dan direncanakan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Keberhasilan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan keberhasilan utama dalam instrumen pembangunan.

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi

pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah telah berusaha secara serius dan menyeluruh terhadap penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional ataupun pada tingkat wilayah (daerah). Pemerintah pusat telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K bertugas untuk mengatasi, menanggulangi, dan mengurangi tingkat kemiskinan pada skala nasional melalui kerjasama dengan pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten se-Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat nasional menjelaskan, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan akhir Maret 2013 sebesar 28,07 juta jiwa dengan prosentase kemiskinan sebesar 11,37% dengan rincian jumlah penduduk miskin di kota sebesar 10,33 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin di desa sebesar 17,74 Juta Jiwa.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 tertuang sembilan agenda utama pembangunan, di mana pada *point* ke dua adalah memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. Provinsi Jawa Timur berada pada urutan lima belas (15) pada ukuran tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia dengan prosentase kemiskinan mencapai 15,26 %. Hal ini berada diatas prosentase kemiskinan di tingkat nasional yang mencapai 13,33 % (Badan Pusat Statistik, 2011). Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat kemiskinan di Jawa Timur turun 0,32% pada per september 2013

dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4,89 Juta Jiwa atau sebesar 12,73% dari total penduduk. Sedangkan pada per Maret 2014, penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dengan 38 Kabupaten/Kota tersebut sebesar 4,78 Juta atau 12,43% dari total penduduk. Tingkat kemiskinan dalam pendataan BPS berdasar ukuran garis kemiskinan. Pada September 2013 lalu garis kemiskinan diukur berdasar pengeluaran per bulan per kepala sebesar Rp273.758. Sedangkan Maret 2014 garis kemiskinan diukur berdasar pengeluaran Rp.282.796 per kepala/bulan.

Urgensitas masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tergambar dari sembilan isu strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 (Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, 2011). Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas diantara program pemerintah yang lainnya, termasuk bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemberantasan dan penanggulangan angka kemiskinan yang semakin tinggi, Kabupaten Sidoarjo membuat sebuah kebijakan yang menyangkut percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sebagaimana diketahui, tingkat kemiskinan Sidoarjo per tahun 2009 mencapai 6,91 persen dan pada tahun 2012 mencapai 6,42 persen, dan pernah meningkat pada tahun 2010 sebesar 7,45 persen.

**Tabel 1.1**

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009-2012**

Uraian	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2012			
	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penduduk Miskin (000)	120.9	144.928	136.3	129.4
Persen (%) Penduduk Miskin	6,91	7,45	6,97	6,42

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo**

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur seperti Kabupaten Batu, Surabaya, dan Madiun. Padahal

Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kawasan industri dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya.

Penciptaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran, namun penciptaan lapangan pekerjaan ini harus memperhatikan berbagai aspek dan dirangkum menjadi perencanaan tenaga kerja. Di mana perencanaan tenaga kerja ini akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.001.225 orang. Dari jumlah ini, sebanyak 83.603 orang pengangguran dengan prosentase pengangguran terbuka sebesar 8,37%. Pada akhir tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebesar 1.027.662 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 42.416 adalah pengangguran dengan prosentasi pengangguran terbuka mencapai 4,13%. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan tersedianya job fair dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa, sehingga tidak terlalu akurat untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu digunakan PDRB atas dasar harga konstan yang telah menghilangkan inflasi sehingga bisa diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa PDRB tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan Industri Rumah Tangga (IRT) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

**Tabel 1.2**  
**PDRB Tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo**

NO	SEKTOR	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
1	Pertanian	2.104.986,16	928.911,54
2	Pertambangan dan Penggalian	130.068,54	56.868,59
3	Industri Pengolahan	30.812.130,11	13.229.716,08
4	Listrik, Gas, Dan Air Bersih	1.036.139,71	414.906,86
5	Konstruksi	772.051,92	300.596,45
6	Perdagangan	21.564.963,41	9.009.935,54
7	Angkutan dan Komunikasi	8.927.958,12	4.097.329,75
8	Keuangan, Perseweraan, dan Jasa Perusahaan	1.102.761,69	447.010,16
9	Jasa - jasa	3.783.609,41	1.473.609,66
	Total	73.933.189,67	29.958.884,64

**Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo**

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2008). Inflasi merupakan salah masalah dalam suatu perekonomian pada tingkat nasional ataupun pada tingkat daerah. Di Kabupaten Sidoarjo, inflasi tahun 2012 sebesar 3,93%. Sementara pada tahun 2013, inflasi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7,5% (BPS Kabupaten Sidoarjo).

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja). Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah telah terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000. Hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 yang hanya sebesar Rp.1.720.000 (Pemprov Jatim).

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk mengatasi masalah kemiskinan. Besarnya angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor



terutama jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
5. Apakah PDRB, UMK, pengangguran, dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
5. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, UMK, pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4 Manfaat**

1. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengukuran tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat secara individu.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kemiskinan.



## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Dalam pengertian lainnya, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi serba kekurangan. Karakter kemiskinan meliputi ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan, dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan keahlian rendah.

Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers (1987) adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

##### 1. Kemiskinan (*Proverty*)

Pengertian kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan – kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku juga pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

##### 2. Ketidakberdayaan (*Powerlessness*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

##### 3. Kerentanan (*Vulnerability*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal dan situasi-situasi lainnya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

#### 4. Ketergantungan (*Dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

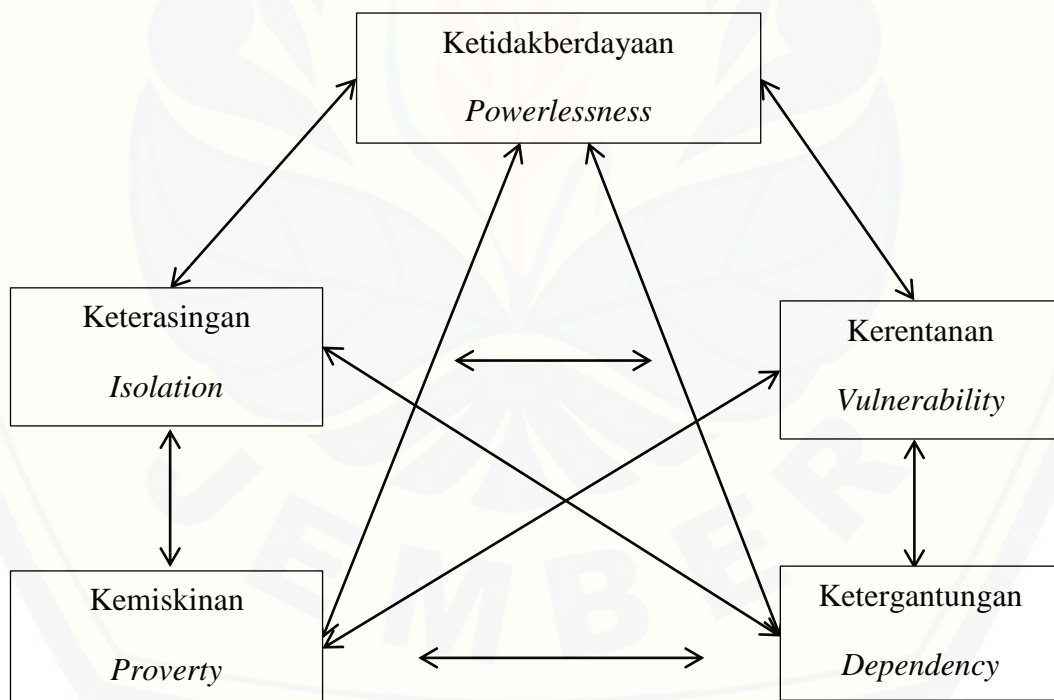
#### 5. Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Perangkap kemiskinan atau *deprivation trap* di atas terdiri dari lima unsur yang telah dijelaskan oleh Chambers (1984), yaitu kemiskinan (*poverty*), isolasi (*isolation*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerentanan (*vulnerability*), dan ketergantungan (*dependency*). Kelima unsur ini seringkali mempunyai keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, sehingga perangkap kemiskinan ini merupakan sesuatu yang berbahaya untuk peluang hidup orang atau keluarga miskin. Dari kelima unsur tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapatkan perhatian yang utama. Kerentanan menurut Chambers adalah seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya

pengobatan yang relatif mahal dan situasi-situasi lainnya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

Kerentanan ini sering menimbulkan *proverty rackets* atau roda penggerak kemiskinan, yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi rentan dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam sebuah kasus dimana perangkat desa memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya ditujukan untuk keluarga miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin di kesempatan yang lain mungkin ditunjukkan dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan seseorang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan ini sering pula mengakibatkan terjadinya bantuan terhadap masyarakat miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi.



**Gambar 2.1 Perangkap Kemiskinan**

**Sumber : Chambers (1987)**

#### 2.1.1.1 Klasifikasi Kemiskinan

Menurut Kuncoro (1997:103) mengemukakan bahwa kemiskinan tersebut merupakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum atau ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

1. Kemiskinan absolut (*absolute proverty*) kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif (*relative proverty*) kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.
3. Kemiskinan kultural (*cultural proverty*) mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak ingin berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural (*struktural proverty*) dimana situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial kebudayaan dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Pada kondisi sekarang ini, kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain.

#### 2.1.1.2 Kriteria Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2011) ada 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga dikategorikan miskin adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu /dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

#### 2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan dinamis serta berakitan dengan ruang, waktu dan tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, akan muncul berbagai tipologi dan dimensi dalam pembahasan penyebab kemiskinan. Menurut (Sharp, dalam Kuncoro, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang

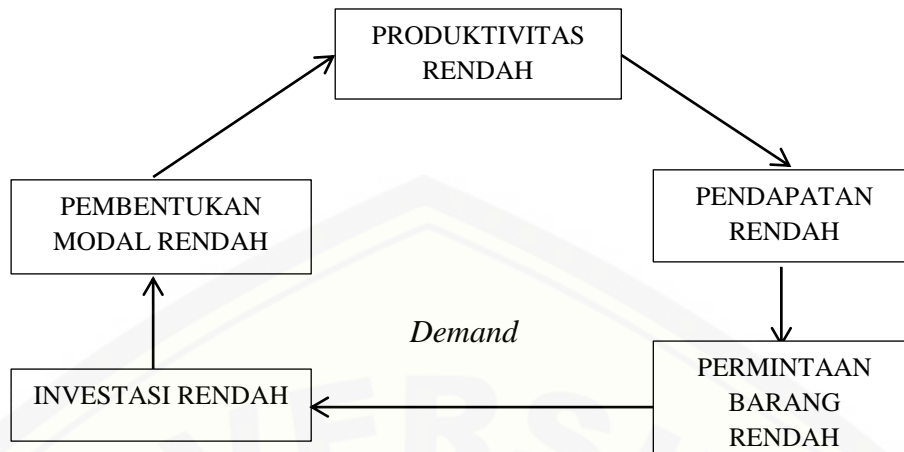
timbang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktifitas yang rendah, pada akhirnya berimplikasi pada upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan keturunan.
3. Kemiskinan muncul diakibatkan perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Nurkse (1953) (dalam Jhingan, 2010). Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi modal.

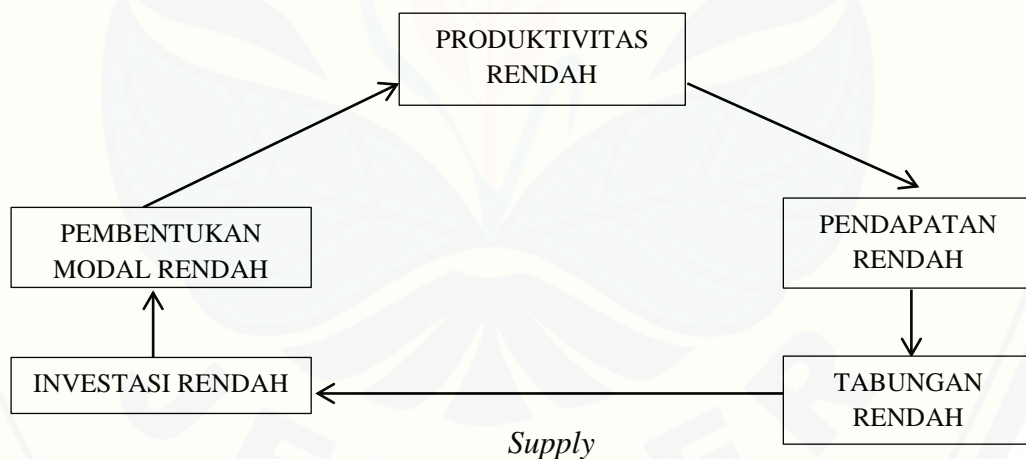
Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu pertama, dari sisi permintaan (*demand*), di negara-negara miskin kemampuan untuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan tingkat produktivitasnya yang rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.





**Gambar 2.2** Lingkaran Setan Kemiskinan dari sisi *Demand*

Kedua, sisi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya.



**Gambar 2.3** Lingkaran Setan Kemiskinan dari sisi *Supply*

Sumber : Jhingan, 2010

#### 2.1.1.4 Garis Kemiskinan

Batas garis kemiskinan disetiap negara mempunyai perbedaan dalam setiap pengukurannya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standart kebutuhan hidup masyarakat di masing-masing negara. Garis Kemiskinan

merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS, 2014).

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP).

### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dari satu periode ke periode yang lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2008:9)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui besarnya PDRB, baik secara sektoral maupun secara perkapita. Selama ini, data PDRB yang dipublikasikan oleh BPS menggunakan pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan). Pengumpulan data PDRB dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk PDRB sektoral, data dikumpulkan dari departemen/intansi terkait. Data yang dikumpulkan dari setiap sektor antara lain berupa data produksi, data harga di tingkat produsen, dan biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi, serta data pengeluaran, yang diperoleh baik melalui survei maupun estimasi.
2. Untuk PDRB pengeluaran, data dikumpulkan departemen atau instansi terkait yang secara resmi mengeluarkan data (seperti ekspor-impor, pengeluaran dan investasi pemerintah, serta investasi swasta) dan melalui survei-survei khusus (seperti survei khusus pengeluaran rumah tangga).

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia) :

1. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.
2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

#### 1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

#### 2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

### 3. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

#### 2.1.2.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Hapsoro (2013) mengatakan bahwa penggunaan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB berlaku secara menyeluruh. Sementara PDRB per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja.

PDRB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah atau wilayah tersebut dalam satu tahun tertentu. Maka dalam pengertian tersebut dapat diartikan bahwa suatu perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Perusahaan yang beroperasi pada daerah atau wilayah tersebut akan menyediakan modal, teknologi dan tenaga ahli kepada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi. Beroperasinya perusahaan di daerah atau wilayah tersebut akan membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi dari daerah tersebut, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Penambahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat tersebut akan menghindarkan masyarakat tersebut dari kemiskinan. Begitu juga sebaliknya, apabila penambahan produksi berkurang, penambahan tenaga kerja berkurang, maka pendapatan akan berkurang yang selanjutnya akan menyebabkan kemiskinan.

### 2.1.3 Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karena itu upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum atau sering disebut Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pemerintah telah mengembangkan penerapan upah minimum. Sasarannya adalah supaya upah minimum itu paling sedikit cukup menutupi kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya. Dengan demikian, kebijaksanaan penentuan upah minimum adalah : (a) menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas kerja karyawan, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2002:113).

Departemen Tenaga Kerja dan Dewan Penelitian Pengupahan di daerah, setiap tiga bulan sekali melakukan penghitungan terhadap kebutuhan fisik minimum seorang pekerja lajang (PL), keluarga dengan dua orang anak (K2) dan keluarga dengan tiga orang anak (K3). Komponen kebutuhan fisik minimum tersebut dapat digolongkan dalam lima kelompok (Sumarsono, 2002), yaitu :

- a. Kelompok makanan dan minuman terdiri dari beras, daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ubi, minyak goreng, cabe, kelapa, gula, garam, teh dan kopi.
- b. Kelompok bahan bakar dan penerangan terdiri dari kayu bakar atau minyak tanah, lampu teplok dan air minum.
- c. Kelompok perumahan dan peralatan terdiri dari sewa rumah, tempat tidur, bantal, piring, gelas minum, dan sebagainya.
- d. Kelompok pakaian terdiri dari bahan celana atau rok, kemeja, baju, baju kaos, kain sarung, peci, handuk, sepatu dan sandal. Untuk yang berkeluarga ditambah kain kebaya, kain panjang, dan pakaian anak.
- e. Kelompok lain-lain mencakup transportasi, rekreasi, obat-obatan, pendidikan dan bacaan.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan, upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan dan berfungsi sebagai jaminan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut Undang-undang dan Peraturan yang dibayarkan atas persetujuan perjanjian kerja. Upah dibagi menjadi lima jenis, yaitu :

1. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah Nyata (Riil Wages)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.

3. Upah Hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

4. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.

5. Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan.

#### 2.1.3.1 Definisi Upah Minimum

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu

persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Sumarsono, 2002:114).

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP NO. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun sub-sektoral. Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah pokok minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun sub sektoral. Peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan (Sumarsono, 2002).

Upah minimum memiliki jenis dan bentuk yang digolongkan pada tingkatan regional ataupun wilayah, yaitu :

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- c. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.
- d. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Tjiptoherijanto (2004) memaparkan dewasa ini paling tidak ada lima faktor utama yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah, yaitu :

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat inflasi.
3. Perluasan kesempatan kerja.
4. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional.
5. Tingkat perkembangan perekonomian (PDRB) daerah setempat.

Kelima faktor tersebut, ada tiga faktor yang termasuk dalam indikator makro ekonomi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), perluasan kesempatan kerja, tingkat perkembangan perekonomian (PDRB) daerah setempat. Sementara itu dua faktor yang lainnya yaitu upah regional dan kebutuhan hidup minimum termasuk dalam indikator mikro ekonomi.



### 2.1.3.2 Penetapan Upah

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kotamadya, dimana gubernur menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten atau Kotamadya (UMK), berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar kerja.

Peninjauan terhadap besarnya UMP dan UMK diadakan satu tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum berlaku selama satu tahun. Selain upah minimum sebagaimana tersebut tadi, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi) yang didasarkan pada kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Sehingga Upah Minimum dapat terdiri dari Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).

### 2.1.3.3 Teori-teori Pengupahan

#### a. Teori Upah Bayangan (*Shadow Wages*)

Teori ini menyatakan bahwa di negara sedang berkembang tingkat upah pada dasarnya tidak fleksibel karena upah lebih ditentukan terutama oleh kekuatan-kekuatan kelembagaan, yang meliputi desakan-desakan dari serikat pekerja, praktek-praktek pengupahan perusahaan, maupun skala upah yang diatur oleh pemerintah (Todaro, 200:313).

Menurut Yuwianti (2012) pada kondisi semacam ini tingkat upah yang terjadi tidak menggambarkan titik ekuilibrium yang sebenarnya (pertemuan permintaan dan penawaran) dikarenakan mekanisme pasar tidak berjalan dengan sempurna sehingga suatu acuan tertentu yang oleh J.Tinbergen, HB.Chenery dan Kretchemer disebut *shadow price*. Dalam kaitannya dengan upah tenaga kerja, harga bayangan lebih sering disebut sebagai *shadow wages*

(Upah Bayangan) atau upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam membantu berjalannya mekanisme pasar di pasar tenaga kerja.

b. Teori Upah Substitusi

Teori upah substitusi “hukum besi” oleh Ricardo (1772-1823) upah ditentukan oleh interaksi penyediaan dan permintaan akan buruh. Lebih lanjut berasumsi bahwa bila pendapatan penduduk bertambah di atas tingkat subsisten, maka penduduk akan bertambah lebih cepat. Laju pertumbuhan makanan dan kebutuhan lain. Angkatan kerja bertambah akan bertambah pula memasuki pasar kerja dan mencari kerja. Penyediaan buruh menjadi lebih besar dari permintaan, akibatnya tingkat upah akan didorong untuk turun kembali ke tingkat subsisten. Kelemahan teori Ricardo, pertama, laju pertumbuhan penduduk tidak mutlak mempengaruhi penghasilan (upah) karena ada faktor sosial dan faktor sosiologis. Kedua, banyak negara dalam industri dan kesempatan kerja tumbuh lebih cepat dari laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerjanya, karena kemajuan teknologi dan peningkatan pendidikan serta perbaikan gizi termasuk kesehatan secara terus menerus mendorong peningkatan produktivitas buruh. Ketiga, kompetisi bisnis sekarang ini mendorong pengusaha meningkatkan produktivitas, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi meningkatkan kualitas buruhnya (Simanjuntak, 1996).

2.1.3.4 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman, 2000).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan

kesejahteraan para pekerja tanpa menurunkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

#### **2.1.4 Pengangguran**

Ada dua masalah kronis yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara ataupun daerah, yaitu inflasi dan pengangguran. Pengangguran merupakan suatu masalah kronis dalam makro ekonomi yang secara tidak langsung dapat menimbulkan efek pada sektor yang lainnya selain sektor ekonomi. Seseorang yang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan akan mendapatkan beban psikologis dan standar kehidupan.

Menurut Sukirno (2008), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang-barang yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan adanya pengangguran adalah menganggur karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik, pengusaha menggunakan peralatan produksi dengan teknologi maju yang dapat meminimalkan penggunaan tenaga kerja, dan ketidaksesuaian di antara ketrampilan pekerja yang sebenarnya dengan ketrampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

Besarnya pengangguran biasanya digambarkan dengan tingkat pengangguran yaitu persentase jumlah menganggur terhadap angkatan kerja. Pengangguran dapat dikelompokkan berdasarkan pada beragam karakteristik, misalnya dikelompokkan menurut jenis kelamin, tingkat keterampilan,

pendidikan, dan berdasarkan alasan menganggur (Sukirno, 2008). Berdasarkan alasan menganggur terdapat beberapa jenis pengangguran yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.
- b. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja yang berkaitan dengan ketrampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.
- c. Pengangguran siklikal yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya kemerosotan permintaan agregat yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga kerja atau menutup perusahaannya.
- d. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang ditimbulkan dari adanya pergantian tenaga manusia oleh tenaga mesin ataupun bahan kimia.

Berdasarkan ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut (Sukirno, 2008:330) :

1. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.
2. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang utamanya berada di sektor pertanian atau jasa. Di negara berkembang seringkali diperoleh bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya mereka dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.
3. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang utamanya berada di sektor pertanian dan perikanan. Pengangguran ini terjadi karena pergantian musim. Di luar musim panen dan turun kesawah banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru.

Selama masa menunggu tersebut mereka digolongkan sebagai pengangguran musiman.

4. Setengah menganggur. Dalam negara berkembang, migrasi dari desa dan kota sangatlah pesat. Sebagian penduduk yang melakukan migrasi terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan tersebut digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployment*).

#### 2.1.4.1 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai titik maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Terjadinya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat dan akan berakhir pada kemiskinan (Sukirno, 2008:14).

Menurut Sukirno (2008:331), pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada pemerataan distribusi pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak akan dapat memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Ditinjau dari segi mikro, apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan. Kedua, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan. Masalah tersebut sangatlah erat hubungannya dengan masalah kemiskinan.

### 2.1.5 Inflasi

Pengertian inflasi secara umum adalah kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa secara terus menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi juga bisa terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya (a) kenaikan harga-harga barang yang diimpor, (b) penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan (c) akibat dari adanya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat dari pemerintahan yang kurang bertanggung jawab (Sukirno, 2008:15).

#### 2.1.5.1 Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan jenis-jenis inflasi, Inflasi dapat digolongkan berdasarkan sifatnya sebagai berikut (Samuelson, dalam Yanti, 2011:30) :

- a. Inflasi ringan ( $< 10\%$  setahun), ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif
- b. Inflasi sedang ( $10\%$ - $30\%$  setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.
- c. Inflasi berat ( $30\%$ - $100\%$  setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.
- d. Hiperinflasi ( $>100\%$  setahun), dimana inflasi ini paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang.

Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu (Sukirno 2002) :

- a. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi

dalam mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini menimbulkan inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya (*Cost- Push Inflation*)

Inflasi ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari kerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang.

2.1.5.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Adanya kenaikan harga barang terjadi apabila tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang akan menimbulkan ketidakmampuan masyarakat dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan. Seperti pengangguran, inflasi juga dapat menimbulkan efek buruk pada individu dan masyarakat serta kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah menurunkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja yang berpenghasilan tetap. Kenaikan harga barang-barang akan berlaku lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Kemerostan upah riil dan taraf kemakmuran hidup masyarakat ini akan berujung pada masalah kemiskinan (Sukirno, 2008).

2.1.5.3 Teori Inflasi

Menurut Yudha (2013), terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan inflasi, yaitu :

a. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, bahwa inflasi itu hanya bias terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga

beras akan berhenti dengan sendirinya. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

#### b. Teori Strukturalis

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural ini, pertumbuhan produksi barang lebih lambat dibandingkan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya penawaran (*supply*) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Dhika Putri Yuwianti (2012), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Lumajang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian *explanatory research*, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pola hubungan antara dua variabel atau lebih, jika perlu bisa digunakan untuk mengetahui sifat hubungan tersebut. Pengolahan data atau analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan melakukan uji t, uji f dan  $R^2$  (Koefisien Determinasi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) diperoleh hasil yang berbeda, yaitu PDRB, UMK, dan Pendidikan yang digunakan dari angka melek huruf mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Lumajang. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Lumajang.

Nurfitri Yanti (2011), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2009”. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 1998-2009. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi



berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. Tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Roby Cahyadi Kurniawan (2013), dengan judul “Analisis Nilai PDRB, Upah, Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga dan Jumlah Industri Secara Individu terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang tahun 1980-2011”. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F) dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, inflasi, investasi dan jumlah industri memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. UMK tingkat bunga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hasil pengujian secara simultan diperoleh bahwa pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh PDRB, Upah, Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga, dan Jumlah Industri secara bersama-sama.

Sri Wahyudi Suliswanto (2010), meneliti tentang “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil analisis diperoleh nilai PDRB di masing-masing provinsi belum terlalu besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun lebih dominan pengurangan angka kemiskinan dari variabel IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak cukup hanya dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Peningkatan kualitas SDM akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap pengurangan angka kemiskinan yang terjadi.

Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang (2013). Berdasarkan penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”. Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

Fatkul Mufid Cholili dan M. Purdjihardjo (2014). Penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah dengan judul “Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)”. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tiga variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan variabel independen adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran baik secara simultan maupun secara parsial. Alat analisis yang digunakan adalah model Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen. Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

I.A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi (2013). Penelitian yang dimuat dengan judul “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun persamaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan antara lain PDRB, UMK, pengangguran, inflasi, dan kemiskinan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah alat analisis yang digunakan, objek penelitian serta periode penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dhika Putri Yuwianti (2012). <i>Skripsi. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas ekonomi, Universitas Jember.</i>	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Lumajang	PDRB, UMK, Pengangguran, Pendidikan	Regresi Linear Berganda	PDRB, UMK, Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
2.	Nurfitri Yanti (2011). <i>Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional.</i>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999 – 2009”	Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja	Regresi Linear Berganda	Pertumbuhan ekonomi, inflasi, tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan.
3.	Roby Cahyadi Kurniawan (2013). <i>Jurnal Ilmiah. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas</i>	Analisis nilai PDRB, Upah, Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga dan Jumlah Industri secara individu terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Malang	Nilai PDRB, Upah, Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga dan Jumlah Industri	Regresi Linear Berganda	PDRB, inflasi, investasi, jumlah industri memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka. UMK dan tingkat bunga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

	Brawijaya.	tahun 1980-2011.			pengangguran terbuka.
4.	Sri Wahyudi Suliswanto (2010). <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan an. Vol 8 No. 2 Desember 2010.</i> Universitas Brawijaya Malang.	Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia	PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Analisis Regresi Data Panel	secara parsial PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan
5.	Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang (2013). <i>Jurnal Economia.</i> Volume 9, Nomor 1, April 2013. Universitas Negeri Semarang.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik	Ordinary Least Square (OLS)	Tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. PDRB, pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
6	Fatkhul Mufid Cholili dan M.Purdjihar djo(2014). <i>Jurnal Ilmiah.</i> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Brawijaya.	Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Jumlah	Indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran	Ordinary Least Square (OLS)	PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM dan pengangguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

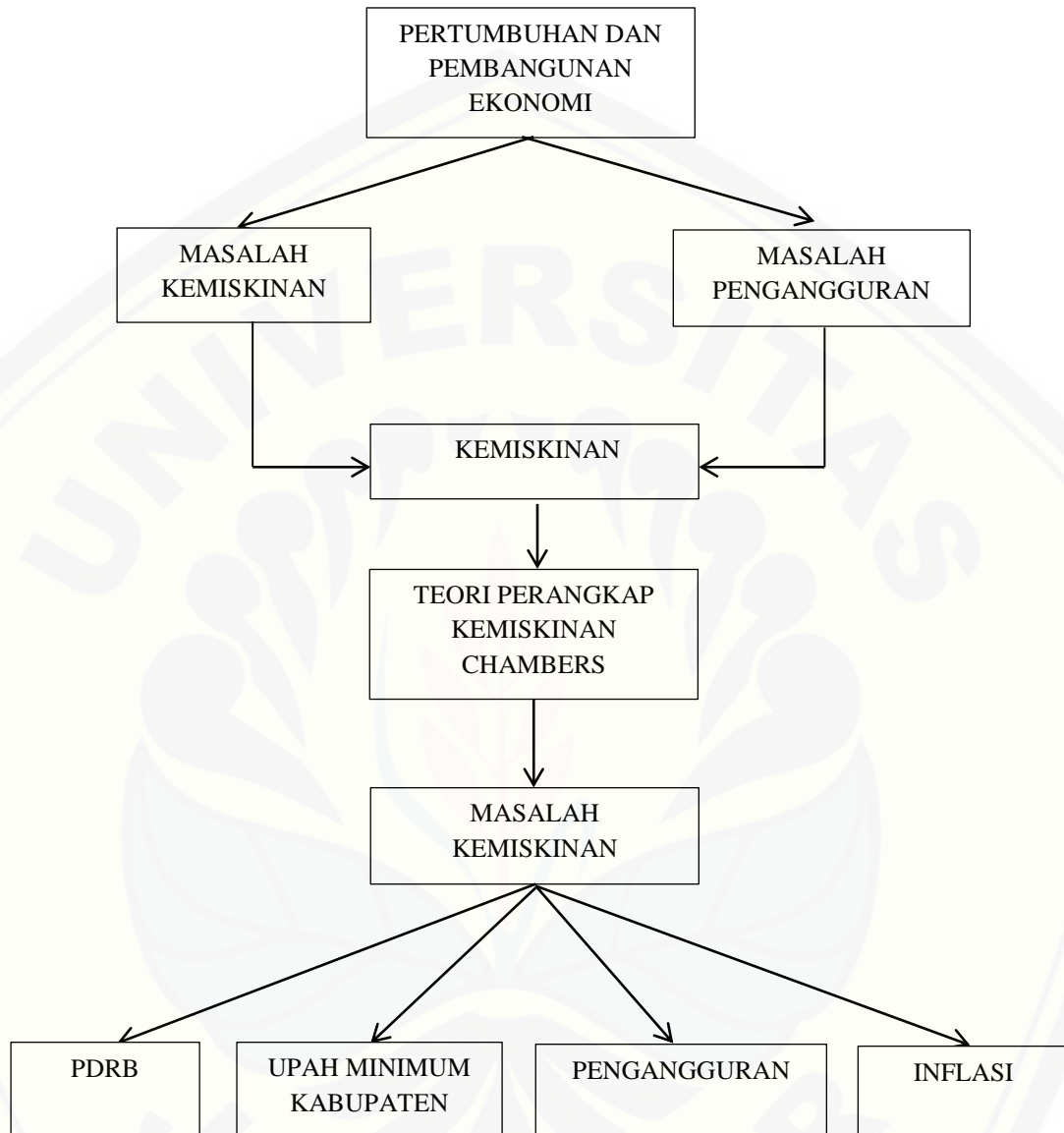
		Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)			
7	I.A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi (2013). <i>E- Jurnal EP Unud</i> , 2 [10] : 441- 448. Jurusan Ekonomi Pembangun an, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana	Beberapa Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali	Pertumbuha n ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat penganggur an	Regresi Linear Berganda	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan diantara beberapa kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur. Hal ini tidak lepas dari kondisi Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan sebagai salah satu kawasan industri di Jawa Timur. Namun dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi, masalah kemiskinan tampaknya masih menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Menurut teori perangkat kemiskinan dari Chambers, terdapat lima faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu Kemiskinan itu sendiri (*poverty*), Ketidakberdayaan (*Powerlessness*), Kerentanan (*vulnerability*), Ketergantungan (*dependency*) dan Keterasingan (*Isolation*). Dalam penyelesaian masalah kemiskinan yang menggunakan teori perangkat kemiskinan dari Chambers, maka teori ini digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dapat

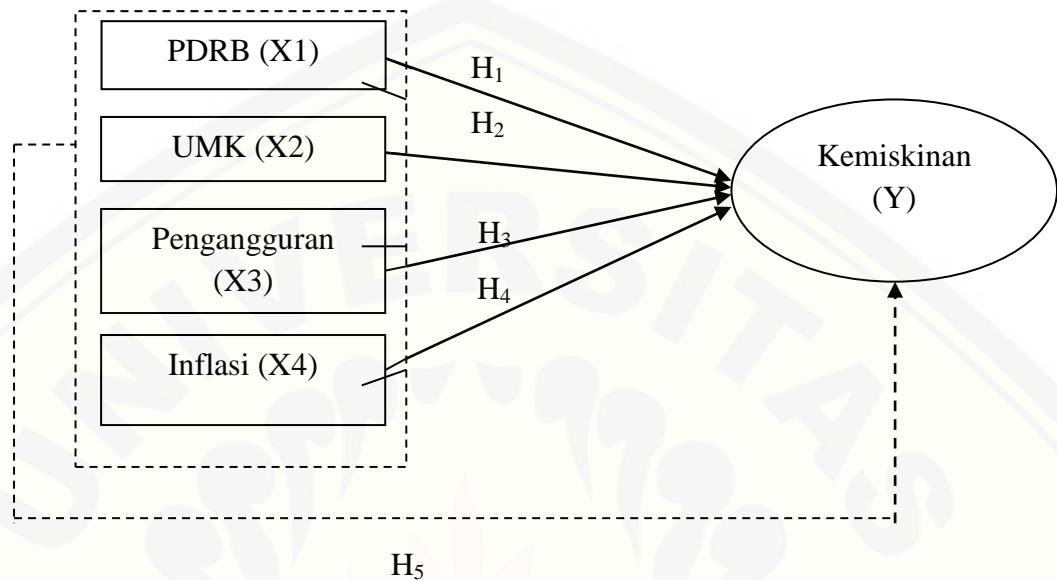
mempengaruhi terjadinya masalah kemiskinan, yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pengangguran, dan Inflasi.



**Gambar 2.4 Kerangka Berpikir**

Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai pedoman dan dapat menunjukkan alur pemikiran penelitian. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Kerangka pemikiran konseptual menggambarkan PDRB (X1), UMK (X2), pengangguran (X3), dan inflasi (X4) sebagai variabel bebas dan keempat variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan (Y). Kerangka pemikiran konseptual ini menunjukkan bahwa PDRB (X1), UMK (X2), pengangguran (X3), dan inflasi (X4) secara parsial terhadap kemiskinan

(Y). Selain itu, kerangka pemikiran konseptual ini juga menunjukkan bahwa PDRB (X1), UMK (X2), pengangguran (X3), dan inflasi (X4) secara simultan terhadap kemiskinan (Y).



**Gambar 2.5 Kerangka Konseptual**

Keterangan:  $\longrightarrow$  : Parsial  
 $\dashrightarrow$  : Simultan

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

- $H_1$  : PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo;
- $H_2$  : UMK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
- $H_3$  : Pengangguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
- $H_4$  : Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
- $H_5$  : PDRB, UMK, pengangguran, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian memuat suatu rencana tentang informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber khusus dari mana informasi yang diperoleh, strategi untuk mengumpulkannya dan bagaimana menganalisisnya (Murti dan Salamah, 2006:47).

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*) dimana bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan juga termasuk dalam penelitian *hypothesis testing*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menguji suatu hipotesis yang telah diajukan sebelumnya berdasarkan kajian teoritis dan empiris sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini difokuskan untuk mencari pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran, Inflasi terhadap Kemiskinan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area penelitian ini berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

#### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui pihak lain yang berkepentingan dan berkaitan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pembangunan Daerah (BAPEDA), dan Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER). Data yang diambil mulai dari tahun 2004-2013.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data Studi Pustaka. Metode studi pustaka merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik secara pribadi seperti mencari di



internet atau perpustakaan maupun kelembagaan atau instansi yang sedang diteliti.

### 3.5 Identifikasi Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu variabel independen dan variabel dependen.

- a. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang tidak diprediksi oleh variabel lain dalam model (Ferdinand, 2002:41). Variabel ini disebut dengan variabel bebas atau variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diberi simbol ( $X_1$ ), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diberi simbol ( $X_2$ ), Pengangguran yang diberi simbol ( $X_3$ ), dan Inflasi yang diberi simbol ( $X_4$ ).
- b. Variabel dependen terikat adalah variabel yang diprediksikan oleh satu atau beberapa variabel lain dalam model. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kemiskinan yang diberi simbol  $Y$ .

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Metode ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain : data berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi.

##### a. Uji Normalitas Model

- 1) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013:56). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Latan, 2013:56). Kriteria pengujian dengan melihat besaran *kolmogorov-smirnov test* adalah;

- a) Jika signifikansi  $> 0,05$  maka data tersebut berdistribusi normal
- b) Jika signifikansi  $< 0,05$  maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian dari asumsi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Gejala multikolinearitas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:66). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu. seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson (D-W)* untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson statistik terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5% (Sarwono, 2013:52).

### 3.6.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12).

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut *independent variable* (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi disebut *dependent variable* (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat salah satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai regresi sederhana, sedangkan jika variabelnya bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda (Prayitno, 2010:61).

Untuk mengetahui pengaruh PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, digunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut (Prayitno, 2010:61) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

$a$  = bilangan konstanta

$b_1$  = besarnya pengaruh PDRB

$b_2$  = besarnya pengaruh UMK

$b_3$  = besarnya pengaruh pengangguran

$b_4$  = besarnya pengaruh inflasi

$Y$  = kemiskinan

$e$  = faktor gangguan

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah :

a. Uji t

Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya pengaruh PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Rumusnya adalah (Prayitno, 2010:68) ;

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan :

t = test signifikan dengan angka korelasi

b<sub>i</sub> = koefisien regresi

Se (b<sub>i</sub>) = *standard error* dari koefisien korelasi

Formulasi hipotesis uji t ;

1) H<sub>0</sub> : b<sub>i</sub> = 0, i = 1, 2, 3, 4

H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

2) H<sub>a</sub> : b<sub>i</sub> ≠ 0, i = 1, 2, 3, 4

H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

3) *Level of significane* 5% (Uji 2 sisi, 5% : 2 = 2,5% atau 0,025)

b. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat (Prayitno, 2010:67). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub>, secara simultan terhadap variabel Y. Rumus yang akan digunakan adalah :

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(n - k)}$$

Keterangan :

F = pengujian secara simultan

R<sup>2</sup> = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel

n = banyaknya sampel

Formulasi hipotesis uji F ;

1) H<sub>0</sub> : b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> ≠ 0

H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub>) terhadap variabel terikat (Y)

$$2) H_a : b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$$

$H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, tidak ada pengaruh simultan antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$  dan  $X_4$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ )

3) *Level of significane 5%*.

c. Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi adalah data untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut bisa dibenarkan. Dari koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel  $X$  terhadap variasi naik turunnya variabel  $Y$  (Prayitno, 2010:66).

$$R^2 = \sum Y \frac{b^1 \sum X_1 Y + b^2 \sum X_2 Y + b^3 \sum X_3 Y + b^4 \sum X_4 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien determinasi berganda

$Y$  = Variabel terikat (*dependent*)

$X$  = Variabel bebas (*Independent*)

$b$  = Koefisien regresi linier

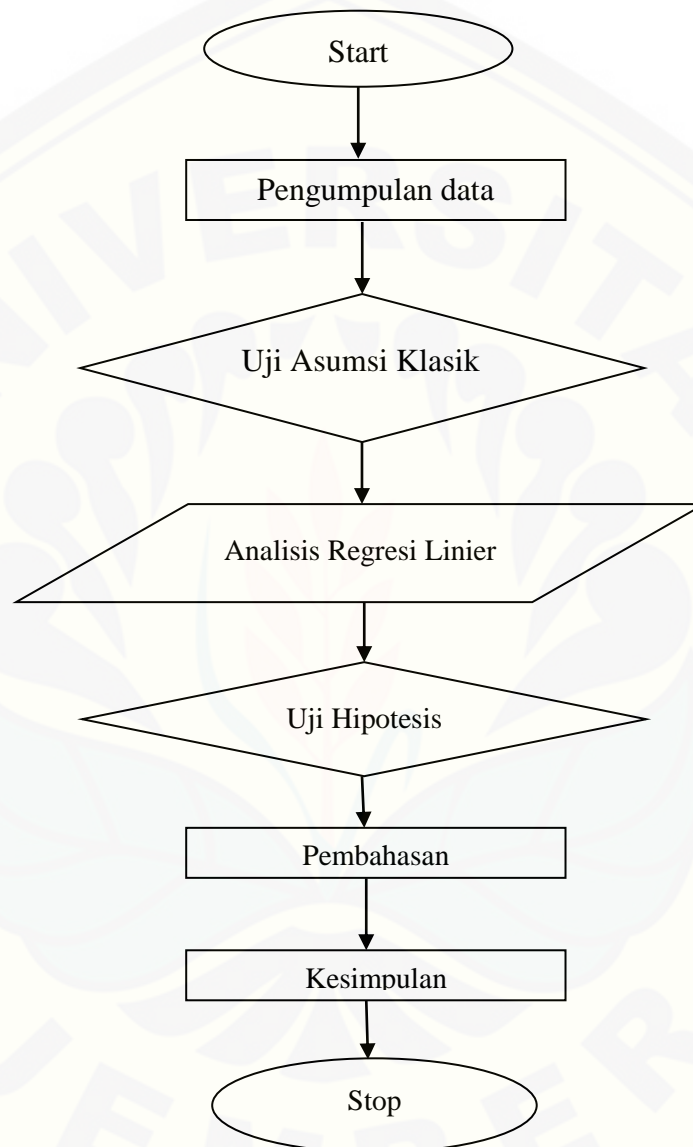
### 3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar variabel penelitian, baik variabel dependen ataupun variabel independen yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur. Definisi operasional variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dalam penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk miskin. penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Artinya, penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita lebih rendah dari garis kemiskinan, maka penduduk tersebut tergolong dalam penduduk miskin. Sebaliknya, apabila pengeluaran

- perkapita penduduk yang berada diatas kemiskinan, maka penduduk tersebut bukan tergolong penduduk miskin. Data kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan data pada periode waktu mulai tahun 2004-2013 (dalam persen).
2. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia). Data PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan pada periode waktu mulai tahun 2004-2013 (dalam rupiah).
  3. Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Data upah minimum kabupaten dalam penelitian ini menggunakan data pada periode waktu mulai tahun 2004-2013 (dalam rupiah).
  4. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran dalam penelitian ini adalah yang dimaksud dengan pengangguran terbuka. Menurut BPS pengangguran terbuka adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Data pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pada periode waktu mulai tahun 2004-2013 (dalam persen).
  5. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa umum secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Data inflasi dalam penelitian ini menggunakan data inflasi *year on year* (dari tahun ke tahun). Data inflasi dalam penelitian ini menggunakan data pada periode waktu mulai 2004-2013 (dalam persen).

### 3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan Kerangka Pemecahan Masalah :

1. Start, merupakan tahap awal atau tahap persiapan penelitian.
2. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian baik itu data primer maupun data sekunder..



3. Uji asumsi klasik, yaitu untuk mengetahui adanya data berdistribusi normal atau tidak, terjadi multikolinearitas atau tidak, terjadi autokorelasi atau tidak dan terjadi heterokedastisitas atau tidak
4. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.
5. Uji hipotesis, digunakan uji t untuk menguji signifikansi atau ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dan digunakan uji f untuk menguji signifikansi atau ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.
6. Pembahasan.
7. Kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
8. Stop, yaitu hasil akhir dari seluruh penelitian.

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo secara geografis terletak pada 112,5° - 112,9° Bujur Timur dan 7,3°-7,5° Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Sidoarjo yang beribukota di Sidoarjo memiliki luas 722 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 353 Kelurahan/Desa dan 18 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati, dan Kecamatan Sukodono. Kecamatan yang memiliki daerah terluas adalah Kecamatan Jabon yaitu sekitar 80.998 Km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Gedangan yaitu sekitar 24.058 km<sup>2</sup>.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sidoarjo berada di dataran rendah. Sidoarjo dikenal dengan sebutan *Kota Delta*, karena berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Mas dan Kali Porong. Kota Sidoarjo berada di selatan Surabaya, dan secara geografis kedua kota ini seolah-olah menyatu. Dari segi transportasi di Kabupaten Sidoarjo terdapat Bandara Internasional Juanda dan terminal bus Purabaya yang dianggap sebagai "milik" Surabaya, berada di wilayah kabupaten Sidoarjo. Terminal Purabaya merupakan gerbang utama Surabaya dari arah selatan, dan salah satu terminal bus terbesar di Asia Tenggara.

Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, diantaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro, Kecamatan Waru dan Tebel, Kecamatan Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih, Kecamatan Tulangan.

#### **4.1.2 Profil Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo terletak di tepi Selat Madura. dan termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Batas-batas administrasi dari kota Sidoarjo ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Waru, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Porong, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krian. Secara geografis wilayah Kota Sidoarjo memiliki luas wilayah 6.256 Ha. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Sidoarjo berada pada ketinggian antara 23 - 32 diatas permukaan laut.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Variabel Penelitian**

Gambaran umum variabel penelitian menggambarkan keadaan atau kondisi, perkembangan, dan peningkatan jumlah atau hasil variabel penelitian dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

##### **4.1.3.1 Kemiskinan**

Kemiskinan dalam penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk miskin, yang dimaksud dengan jumlah penduduk miskin ialah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan data kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dalam bentuk persentase. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dan BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 4.1**

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SIDOARJO			
TAHUN 2004-2013			
(PERSENTASE)			
	NO	TAHUN	PERSENTASE
	1	2004	4,33
	2	2005	4,84
	3	2006	8,82
	4	2007	12,69
	5	2008	8,35
	6	2009	6,91
	7	2010	7,45
	8	2011	6,97
	9	2012	6,42
	10	2013	6,69

Dari data diatas dapat dijelaskan, bahwa kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 dan 2007, kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Disesuaikan dengan kondisi lapangan, hal ini dikarenakan banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja yang dikarenakan dampak bencana lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2007 sampai tahun 2013, kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun penurunan itu tidak terlalu signifikan. Penurunan tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh usaha pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terus mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi yang

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga membuat beberapa kebijakan strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan strategis itu antara lain :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
4. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinegi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### 4.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia). Data PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan pada periode waktu mulai tahun 2004-2013 (dalam rupiah). Data dalam penelitian ini data PDRB didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

#### **Tabel 4.2**

TAHUN	PDRB (JUTA RUPIAH)	PERSENTASE
2004	19.110.831,66	5,33
2005	20.201.363,97	5,71
2006	21.287.726,59	5,38
2007	22.349.583,76	4,99
2008	23.429.989,04	4,83
2009	24.580.830,53	4,91
2010	26.161.612,20	6,43
2011	27.961.435,08	6,88
2012	29.958.884,64	7,14
2013	32.067.605,55	7,04

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah produksi barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami peningkatan tidak terlepas dari jumlah investasi yang terus meningkat di sektor-sektor produktif di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, hal ini juga didukung dengan tingginya daya beli masyarakat terhadap barang-barang dan jasa. Pada tahun 2013, jumlah PDRB di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012, dengan jumlah 32.067.605,55 (rupiah). Peningkatan PDRB di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 ini tidak lepas dari keberhasilan pemerintah Sidoarjo yang berhasil menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, daya beli masyarakat Sidoarjo yang tinggi, juga menyebabkan meningkat PDRB.

#### 4.1.3.3 Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo (UMK)

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja diperusahaannya. Data upah minimum kabupaten dalam penelitian ini

menggunakan data pada periode waktu mulai tahun 2004-2013 (dalam rupiah). Data UMK dalam penelitian ini didapatkan dari Disnaker Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 4.3**

PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN SIDOARJO				
	NO	TAHUN	JUMLAH (DALAM RUPIAH)	PERSENTASE
	1	2004	550.000	6,49
	2	2005	578.250	5,14
	3	2006	682.000	17,94
	4	2007	743.500	9,02
	5	2008	802.000	7,87
	6	2009	955.000	19,08
	7	2010	1.005.000	5,24
	8	2011	1.107.000	10,15
	9	2012	1.252.000	13,10
	10	2013	1.720.000	37,38

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan upah dari tahun ke tahun. Faktor utama yang dapat mempengaruhi jumlah upah adalah adanya kenaikan inflasi dari tahun ke tahun. Kenaikan inflasi ini selanjutnya akan menaikkan harga barang-barang atau kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pekerja. Selain itu, faktor selanjutnya adalah adanya kenaikan kebutuhan keluarga tenaga kerja. Kenaikan upah dari tahun 2012 ke tahun 2013 cukup tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang relatif tinggi, jumlah PDRB Kabupaten Sidoarjo yang relatif tinggi, serta tuntutan buruh atas kenaikan upah minimum yang disesuaikan atas dasar jumlah kebutuhan atau pengeluaran buruh. Dalam setiap pengambilan besaran jumlah upah minimum, pemerintah selalu mempertimbangan lima faktor dalam setiap pengambilan keutusan tersebut, yaitu :

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat inflasi.
3. Perluasan kesempatan kerja.





2004-2009, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Peningkatan pengangguran terbuka dari tahun 2004-2009 ini disebabkan oleh dampak adanya lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Karena pada saat bencana itu terjadi, banyak pabrik yang terpaksa menutup pabriknya dan memberhentikan para tenaga kerjanya. Selain itu, peningkatan ini juga disebabkan oleh tidak meratanya jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo hanya ada di tempat-tempat yang terdapat kegiatan industri.

Pada tahun 2010-2013, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Sidoarjo, luasnya jumlah kesempatan kerja, serta komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga terus mendukung kegiatan usaha kecil menengah mikro dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo.

#### 4.1.3.5 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa umum secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Data inflasi dalam penelitian ini menggunakan data inflasi *year on year* (dari tahun ke tahun). Data inflasi dalam penelitian ini menggunakan data pada periode waktu mulai 2004-2013 (dalam persen). Data inflasi ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 4.5**

Inflasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2004-2013

Tahun	Persentase
2004	0,46
2005	1,23
2006	0,49
2007	0,57
2008	8,35
2009	6,91
2010	7,45
2011	6,97

2012	6,42
2013	6,69

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2004 yang hanya sebesar 0,46%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008. Hal ini terjadi karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi global yang melanda negara-negara di seluruh dunia. Meskipun terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2008, namun hal ini tidak terlalu berdampak pada kondisi perekonomian di tingkat Nasional, Provinsi, atau Kabupaten Sidoarjo. Pada saat itu kenaikan inflasi tidak cukup tinggi, bahkan termasuk rendah di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan besaran kenaikan inflasi tidak lebih dari 10%. Pada tahun 2009-2013, meskipun pernah mengalami kenaikan inflasi pada tahun 2010, namun tingkat inflasi di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengontrol harga barang di pasar, terutama harga kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

#### 4.1.4 Analisis Data

##### 4.1.4.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) (Gujarati dalam Latan, 2013:14). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain yaitu : data berdistribusi normal, model berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, dan tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi linear berganda yang dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test*

dengan menetapkan derajat keyakinan ( $\alpha$ ) sebesar 5% (Prayitno, 2010:71). Adapun hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

<i>Test of Normality</i>	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>			Keterangan
	Sig.		<i>Cutt off</i>	
PDRB ( $X_1$ )	0,814	>	0,05	Normal
UMK ( $X_2$ )	0,721	>	0,05	Normal
Pengangguran ( $X_3$ )	0,882	>	0,05	Normal
Inflasi ( $X_4$ )	0,790	>	0,05	Normal
Tingkat kemiskinan (Y)	0,894	>	0,05	Normal

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### b. Uji Normalitas Model

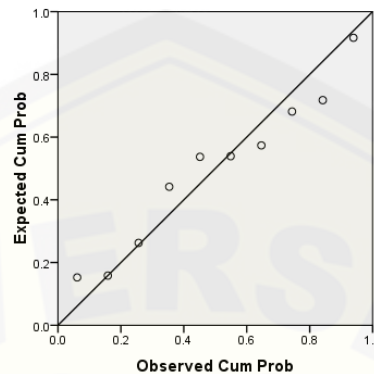
Uji normalitas model bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013:42). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.1, sebagai berikut ;

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Model

Gambar 4.1, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### c. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinieritas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas ;

Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas

<i>Test of Multikolinierity</i>	VIF	<i>Cutt off</i>	Keterangan
PDRB (X <sub>1</sub> )	2,109	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas
UMK (X <sub>2</sub> )	2,182	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengangguran (X <sub>3</sub> )	1,440	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Inflasi (X <sub>4</sub> )	4,448	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Lampiran 2

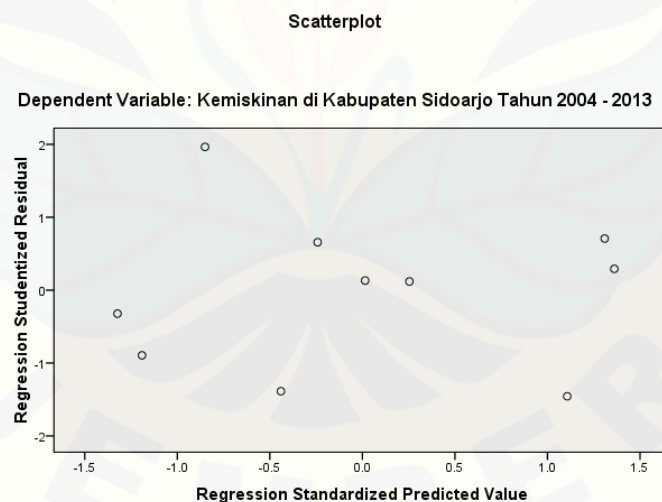
Tabel 4.2, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel *independen* karena menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:39). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.2, sebagai berikut ;



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2, menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

## e. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson (D-W)* untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson statistik terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5% (Sarwono, 2013:52).

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

Nilai D-W	Keterangan
1,751	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* dari persamaan diatas pada penelitian ini berada diantara -2 sampai dengan +2, maka dapat diartikan bahwa dari kedua model persamaan regresi yang telah dirumuskan tidak terjadi autokorelasi.

## 4.1.4.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12). Adapun hasil uji Analisis Deskriptif Statistik ;

Tabel 4.9 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean
PDRB ( $X_1$ )	10	4,38	7,14	5,86
UMK ( $X_2$ )	10	5,14	37,38	13,13
Pengangguran ( $X_3$ )	10	4,13	12,67	8,68
Pengangguran ( $X_4$ )	10	0,26	1,23	0,55

Tingkat kemiskinan (Y)	10	4,33	12,69	7,34
------------------------	----	------	-------	------

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.4, berkaitan dengan analisis deskriptif statistik dapat dilihat bahwa dengan jumlah data sebanyak 10, variabel tingkat kemiskinan (Y) mempunyai rata-rata sebesar 7,34%, dengan nilai minimal 4,33% dan maksimal 12,69%. Variabel PDRB ( $X_1$ ) mempunyai rata-rata 5,86%, dengan nilai minimal 4,38% dan maksimal 7,14%. Variabel UMK ( $X_2$ ) mempunyai rata-rata sebesar 13,13%, dengan nilai minimal 5,14% dan maksimal 37,38%. Variabel pengangguran ( $X_3$ ) mempunyai rata-rata sebesar 8,68%, dengan nilai minimal 4,13% dan maksimal 12,67%. Variabel inflasi ( $X_4$ ) mempunyai rata-rata sebesar 0,55%, dengan nilai minimal 0,26% dan maksimal 1,23%.

#### 4.1.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel *dependen* pada satu atau lebih variabel *independen* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel *independen* yaitu PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi, serta variabel *dependen* yaitu tingkat kemiskinan. Berikut pada Tabel 4.5 disajikan hasil analisis regresi linear berganda ;

Tabel 4.10 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel <i>Independent</i>	<i>Unstandardized</i> Coefficients B	t	$t_{\text{tabel}}$	Sig.	<i>a</i>	Keterangan
(Constant)	-22,358	-	-	-	-	-
PDRB ( $X_1$ )	0,283	2,813	> 2,570	0,035	< 0,05	Signifikan
UMK ( $X_2$ )	0,265	2,729	> 2,570	0,042	< 0,05	Signifikan
Pengangguran ( $X_3$ )	0,394	3,546	> 2,570	0,013	< 0,05	Signifikan
Inflasi ( $X_4$ )	-0,172	-2,683	> 2,570	0,046	< 0,05	Signifikan
<i>Adjusted R Square</i> = 0,709				F. Hitung = 51,595 Sig. F = 0,007		

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah :

$$Y = -22,358 + 0,283X_1 + 0,265X_2 + 0,394X_3 + (-0,172)X_4$$

- a. Nilai konstanta -22,358, menunjukkan bahwa jika tidak ada aktivitas pada PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi maka nilai tingkat kemiskinan sebesar -22,358;
- b. Nilai koefisien 0,283 pada PDRB, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kegiatan PDRB 1 satuan, maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,283, dan sebaliknya;
- c. Nilai koefisien 0,265 pada UMK, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kegiatan UMK 1 satuan, maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,265, dan sebaliknya;
- d. Nilai koefisien 0,394 pada pengangguran, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kegiatan pengangguran 1 satuan, maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,394, dan sebaliknya;
- e. Nilai koefisien -0,172 pada inflasi, menunjukkan bahwa setiap penurunan kegiatan inflasi 1 satuan, maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,172, dan sebaliknya.

#### 4.1.4.4 Uji Hipotesis

##### 4.1.4.4.1 Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* secara signifikan secara parsial. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\%$ , dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $10-4-1 = 5$ . Hasil analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi terhadap variabel *dependen* yaitu tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut :



- a. Variabel PDRB ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t$  2,813 > 2,570 dan signifikansi 0,035 < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti secara parsial variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.  $t_{hitung}$  positif, maka jika ada peningkatan pada variabel PDRB maka akan menurunkan tingkat kemiskinan;
- b. Variabel UMK ( $X_2$ ) memiliki nilai  $t$  2,729 > 2,570 dan signifikansi 0,042 < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti secara parsial variabel UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.  $t_{hitung}$  positif, maka jika ada peningkatan pada variabel UMK maka akan menurunkan tingkat kemiskinan;
- c. Variabel pengangguran ( $X_3$ ) memiliki nilai  $t$  3,546 > 2,570 dan signifikansi 0,013 < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti secara parsial variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.  $t_{hitung}$  positif, maka jika ada peningkatan pada variabel pengangguran maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan;
- d. Variabel inflasi ( $X_4$ ) memiliki nilai  $t$  -2,683 > 2,570 dan signifikansi 0,046 < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti secara parsial variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.  $t_{hitung}$  negatif, maka jika ada penurunan pada variabel inflasi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

#### 4.1.3.4.2 Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi terhadap variabel *dependen* yaitu tingkat kemiskinan secara simultan. Tabel distribusi F dicari pada  $\alpha = 5\%$ , dengan derajat kebebasan (df)  $df_1$  atau  $5-1 = 4$ , dan  $df_2$   $n-k-1$  atau  $10-4-1 = 5$ . Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $51,595 > 5,19$ ) dan signifikansi ( $0,007 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel PDRB, UMK,

pengangguran dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

#### 4.1.3.4.3 Koefisien Determinasi

Berfungsi untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan, maka dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ). Dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) menunjukkan sebesar 0,709 atau 70,9% dan sisanya 29,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti pendapatan perkapita dan jumlah tanggungan keluarga.

## 4.2 Pembahasan

Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa PDRB, UMK, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah negatif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “ada pengaruh PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo” adalah diterima.

### 4.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Semakin tinggi nilai PDRB, maka hal tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Hapsoro (2013) mengatakan bahwa penggunaan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB berlaku secara menyeluruh. Sementara PDRB per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja. PDRB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah atau wilayah tersebut dalam satu tahun tertentu. Maka dalam pengertian tersebut dapat diartikan bahwa suatu perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Perusahaan yang beroperasi pada daerah atau wilayah tersebut akan menyediakan modal, teknologi dan tenaga ahli kepada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi. Beroperasinya perusahaan di daerah atau wilayah tersebut akan membantu menambah barang dan jasa yang di produksi dari daerah tersebut, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Penambahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat tersebut akan menghindarkan masyarakat tersebut dari kemiskinan. Begitu juga sebaliknya, apabila penambahan produksi berkurang, penambahan tenaga kerja berkurang, maka pendapatan akan berkurang yang selanjutnya akan menyebabkan kemiskinan.

PDRB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah adalah baik, dengan artian lainnya bahwa adanya tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo yang relatif mengalami pertumbuhan atau peningkatan dalam setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 telah dapat menekan jumlah angka atau tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Artinya, PDRB yang relatif mengalami peningkatan tentunya akan dibarengi oleh nilai barang dan jasa yang diproduksi di Kabupaten Sidoarjo atau dapat dikatakan bahwa di Kabupaten

Sidoarjo telah mengalami pertumbuhan pada sektor produksi dan industri yang akan mengurangi jumlah pengangguran karena penyerapan tenaga kerja yang relatif terus bertumbuh atau meningkat sehingga secara tidak langsung akan memberikan atau menambah pendapatan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam hidup berumah tangga pada masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. PDRB di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai 32.067.605,55 (dalam rupiah). Hal ini juga sesuai dan berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kemiskinan cukup rendah yaitu sebesar 6,69%.

Sesuai dengan hasil analisis, teori dan studi empiris yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa memang PDRB secara positif berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau daerah. Hal ini juga sesuai dan didukung dengan hasil dari analisis atau penelitian yang dilakukan oleh Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang (2013) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.2.2 Pengaruh UMK Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai UMK pada suatu daerah, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau daerah.

Hasil analisis diatas juga didukung dengan beberapa teori yang ada yang menjelaskan bahwa UMK akan berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman, 2000). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah

minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menurunkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

UMK sebagai upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun sub-sektoral yang merupakan upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun sub sektoral adalah baik, dengan artian lainnya bahwa adanya peningkatan atau perkembangan jumlah upah minimum kabupaten yang ada di Kabupaten Sidoarjo tentunya sangat penting kesejahteraan masyarakat yang berkerja sebagai karyawan atau buruh pada sektor produksi dan industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo, peningkatan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari tentunya akan mengurangi jumlah simpanan yang dimiliki oleh masyarakat, terlebih lagi dengan adanya inflasi atau peningkatan terhadap harga barang akan menjadikan masyarakat makin tertekan, dengan peningkatan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka masyarakat dapat mengimbangi jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk konsumsinya sehingga dengan adanya peningkatan upah minimum kabupaten, maka hal tersebut dapat menekan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terbukti dengan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menurunkan tingkat kemiskinan yaitu bahwa pada tahun 2013, nilai UMK Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.720.000. UMK pada tahun 2013 ini meningkat kurang lebih 20% dari jumlah UMK pada tahun 2012. Pengaruhnya pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga terbukti pada besarnya tingkat kemiskinan tahun 2013, yaitu sebesar 6,69%.

Hasil analisis, teori dan studi empiris yang mempunyai penjelasan sama tentang pengaruh UMK terhadap penurunan tingkat kemiskinan ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh I.A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi (2013) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### 4.2.3 Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan arah positif. Artinya, bahwa semakin tinggi jumlah pengangguran, maka hal tersebut dapat menambah tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai titik maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Terjadinya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat dan akan berakhir pada kemiskinan (Sukirno, 2008:14).

Menurut Sukirno (2008:331), pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada pemerataan distribusi pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak akan dapat memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Ditinjau dari segi mikro, apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan. Kedua, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan. Masalah tersebut sangatlah erat hubungannya dengan masalah kemiskinan.

Pengangguran sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan adalah baik, dengan artian lainnya bahwa adanya angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkannya atau masyarakat yang memang tidak memiliki pekerjaan akan menjadikan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo semakin tinggi, karena dalam hal ini masyarakat belum dapat menghasilkan suatu pendapatan yang layak untuk memakmurkan hidupnya sehingga masyarakat yang belum mampu dalam

memakmurkan hidupnya akan terbatas kemampuannya untuk melakukan pembelanjaan, dan akan terbatas terhadap kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan untuk jumlah tanggungan keluarganya. Pengangguran yang ada sangatlah erat hubungannya dengan pendapatan masyarakat, sehingga terjadinya pengangguran di Kabupaten Sidoarjo akan dapat mengurangi jumlah pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2013, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,13%. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo ini tidak terlepas dari menurunnya tingkat kemiskinan di Sidoarjo pada tahun 2013 dengan jumlah tingkat kemiskinan sebesar 6,69%.

Hasil dari analisis, teori yang digunakan, dan studi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Sidoarjo dapat berpengaruh terhadap bertambahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini juga sesuai dan didukung dengan penelitian yang terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan Dhika Putri Yuwianti (2012) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Fatkhur Mufid Cholili dan M.Purdjihadjo (2014) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh I.A Septyna Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi (2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

#### **4.2.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan arah negatif. Artinya, semakin rendah tingkat inflasi, maka hal tersebut dapat berpengaruh dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Adanya kenaikan harga barang terjadi apabila tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang akan menimbulkan

ketidakmampuan masyarakat dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan. Seperti pengangguran, inflasi juga dapat menimbulkan efek buruk pada individu dan masyarakat serta kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah menurunkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja yang berpenghasilan tetap. Kenaikan harga barang-barang akan berlaku lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Kemerostan upah riil dan taraf kemakmuran hidup masyarakat ini akan berujung pada masalah kemiskinan (Sukirno, 2008).

Inflasi sebagai tingkat kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa secara terus menerus dalam suatu periode tertentu yang merupakan salah satu akibat dari adanya kenaikan harga-harga barang serta penambahan penawaran uang yang berlebihan. Artinya bahwa adanya penurunan tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo tentunya akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat terjadi karena tingkat inflasi yang terjadi pada periode 2004-2013 memang mengalami fluktuatif peningkatan dan penurunan, tetapi peningkatan yang ada hanya terjadi pada awal periode sedangkan pada akhir-akhir periode telah terjadi penurunan pada tingkat inflasi. Adanya penurunan tingkat inflasi akan dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat, menciptakan pendapatan yang tinggi, dan mampu dalam mengimbangi jumlah pengeluaran kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya akan dapat meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, apabila terjadi peningkatan tingkat inflasi maka harga barang kebutuhan akan meningkat, sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan tetap dan masyarakat yang menganggur akan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran, yang selanjutnya akan dapat menambah atau meningkatkan jumlah tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari analisis, penjelasan teori, dan studi empiris di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri Yanti (2011), inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.



## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- a. PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan PDRB yang terjadi didalam suatu daerah maka akan menurunkan tingkat kemiskinan;
- b. UMK berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan UMK yang terjadi didalam suatu daerah maka menurunkan tingkat kemiskinan;
- c. Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah positif. Hal ini membuktikan bahwa adanya

peningkatan tingkat pengangguran yang terjadi pada masyarakat dalam suatu daerah maka akan meningkatkan kemiskinan;

- d. Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan arah negatif. Hal ini membuktikan bahwa adanya penurunan inflasi dalam suatu daerah maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
- e. PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut ;

- a. Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan jumlah PDRB dengan mengoptimalkan tingkat produksi dan industri pada wilayahnya, diharapkan penyerapan tenaga kerja yang ada dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo;
- b. Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi sektor produksi dan industri dalam memberikan upah kepada karyawan atau buruhnya, diharapkan penetapan UMK di Kabupaten Sidoarjo dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada;
- c. Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mendorong kemampuan masyarakatnya dalam berwirausaha, diharapkan masyarakat menganggur dapat berwirausaha dalam meningkatkan pendapatan serta mengurangi kemiskinan yang ada;
- d. Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat lebih menekan tingkat inflasi yang terjadi, diharapkan masyarakat dapat mengimbangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan masyarakatnya sehingga akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakatnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit BP STIE YKPN.
- BPS. 2014. *Penduduk*. Surabaya : Badan Pusat Statistik
- BPS. 2014. *Sidoarjo Dalam Angka*. Sidoarjo : Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2013. *Sidoarjo Dalam Angka 2010*. Sidoarjo : Badan Pusat Statistik
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Dari Belakang*. Jakarta : LP3ES.
- Fatkhul Mufid Cholili dan M. Pudjihardjo. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). *Jurnal*. Malang : Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dengn Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Cetakan ke Empat. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2002. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2005. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Hapsoro, Dedy Nursetyo Yekti. 2013. “Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota Di Indonesia Tahun 2007-2010)”. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Jatim, BAPPEDA. 2013. *Pengarahan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur*. Banyuwangi : BAPPEDA JATIM.
- Jatim, TNP2K. 2011. *Indikator Kesejahteraan Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: TNP2K .
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta
- Murti, S, & Salamah, W. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- Putri, I.A Septyana Mega & Yuliarmi, Ni Nyoman. 2013. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 2, No. 10.
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. MediaKom, Yogyakarta
- Roby Cahyadi Kurniawan. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Malang Tahun 1980-201. *Jurnal*. Malang : Brawijaya
- Rusdarti dan Sebayang, Lesta Karolina. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Economia Jurnal*. Vol. 9 Nomor 1.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *12 Jurus Ampuh SPSS Untuk Riset Skripsi*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo
- Santoso, S. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : Media Komputindo.
- Santoso, Singgih. 2004. *SPSS Versi 10*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Elek Media Komputindo Gramedia.
- Santoso, Singgih. 2004. *SPSS Versi 12*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Elek Media Komputindo Gramedia.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 1992. *Makro Ekonomi Edisi Keempatbelas*. Erlangga : Jakarta.
- Saputra, Adhi W & Drs. Mudakir, Bagio Y, MSP. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah. *Jurnal*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sitompul, Linda N. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara*. Sumatera Utara : USU
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

- Sukirno, Sadono. 2008. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 8 No. 2.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Penerbit Graha Ilmu: Jember.
- Suryawati, C. 2005. “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”. Tesis. Tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh Jilid 1 (Terjemahan haris Munandar). Jakarta : Erlangga
- Tulus H. Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- TKPKD. 2013. *Penanggulangan Kemiskinan*. Sidoarjo.
- Yanti, Nurfitri. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999-2009”. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Yarnest. 2004. *Panduan Aplikasi Statistik*. Malang : Penerbit Dioma.

**LAMPIRAN 1. REKAPITULASI DATA SEKUNDER**

TABEL PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2004-2013				
	TAHUN	PDRB (JUTA RUPIAH)	PERSENTASE	
	2004	19.110.831,66	5,33	
	2005	20.201.363,97	5,71	
	2006	21.287.726,59	5,38	
	2007	22.349.583,76	4,99	
	2008	23.429.989,04	4,83	
	2009	24.580.830,53	4,91	
	2010	26.161.612,20	6,43	
	2011	27.961.435,08	6,88	
	2012	29.958.884,64	7,14	
	2013	32.067.605,55	7,04	

PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN SIDOARJO				
	NO	TAHUN	JUMLAH ( DALAM RUPIAH)	PERSENTASE
	1	2004	550.000	6,49
	2	2005	578.250	5,14
	3	2006	682.000	17,94
	4	2007	743.500	9,02
	5	2008	802.000	7,87
	6	2009	955.000	19,08
	7	2010	1.005.000	5,24
	8	2011	1.107.000	10,15
	9	2012	1.252.000	13,10
	10	2013	1.720.000	37,38

JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN SIDOARJO				
TAHUN 2004-2013				
(DALAM PERSENTASE)				
	NO	TAHUN	PERSENTASE	
	1	2004	8,98	
	2	2005	10,47	
	3	2006	10,14	
	4	2007	12,67	
	5	2008	11,91	
	6	2009	10,19	
	7	2010	8,35	
	8	2011	4,75	
	9	2012	5,21	
	10	2013	4,13	

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SIDOARJO			
TAHUN 2004-2013			
(PERSENTASE)			
	NO	TAHUN	PERSENTASE
	1	2004	4,33
	2	2005	4,84
	3	2006	8,82
	4	2007	12,69
	5	2008	8,35
	6	2009	6,91
	7	2010	7,45
	8	2001	6,97
	9	2012	6,42
	10	2013	6,69

INFLASI KABUPATEN SIDOARJO PER BULAN TAHUN 2004-2013										
(2007 =100)										
BULAN	TAHUN									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
JANUARI	0,27	0,8	1,75	1,21	1,37	0,07	0,48	0,67	0,35	0,94
FEBRUARI	-0,19	-0,46	0,85	0,2	0,82	0,49	0,32	-0,08	0,22	1,19
MARET	0,36	1,84	-0,06	-0,18	1,32	0,3	-0,09	0,24	0,13	0,82
APRIL	0,57	0,23	0,23	0,7	0,99	-0,07	0,09	-0,26	0,12	-0,33
MEI	0,38	0,29	0,12	0,14	0,81	-0,27	0,5	0,17	0,15	-0,09
JUNI	0,67	0,48	0,26	-0,28	1,61	0,16	0,98	0,46	0,54	0,73
JULI	0,31	1,19	0,34	1,18	0,94	0,44	1,32	0,5	0,61	2,91
AGUSTUS	0,45	0,33	-0,19	0,44	0,73	0,54	0,81	0,91	1,21	0,97
SEPTEMBER	-0,35	0,46	0,73	0,84	0,78	0,88	0,53	0,53	-0,03	-0,16
OKTOBER	0,67	9,97	0,88	0,87	0,51	-0,06	0,49	-0,24	0,14	-0,04
NOVEMBER	1,31	0,34	-0,07	0,62	-0,08	0,18	0,3	0,49	0,23	0,17
DESEMBER	1,07	-0,66	1,09	1,09	-0,84	0,52	0,69	0,54	0,26	0,39
INFLASI	0,46	1,23	0,49	0,57	8,35	6,91	7,45	6,97	6,42	6,69



**LAMPIRAN 2. HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**

DESCRIPTIVES VARIABLES=X.1 X.2 X.3 X.4 Y

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10	4.83	7.14	5.8639	.92214
Upah Minimum Kabupaten (UMK)	10	5.14	37.38	13.1391	9.83443
Pengangguran	10	4.13	12.67	8.6800	3.02501
Inflasi	10	.26	1.23	.5584	.27963
Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013	10	4.33	12.69	7.3470	2.32726
Valid N (listwise)	10				

REGRESSION

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N  
 /MISSING LISTWISE  
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL  
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  
 /NOORIGIN  
 /DEPENDENT Y  
 /METHOD=ENTER X.1 X.2 X.3 X.4  
 /SCATTERPLOT=(\*SRESID ,\*ZPRED)  
  
 /RESIDUALS DURBIN NORM(ZRESID).

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013	7.3470	2.32726	10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.8639	.92214	10
Upah Minimum Kabupaten (UMK)	13.1391	9.83443	10
Pengangguran	8.6800	3.02501	10
Inflasi	.5584	.27963	10

## Correlations

		Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pengangguran	Inflasi
Pearson Correlation	Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013	1.000	.618	.571	.687	-.475
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	.618	1.000	.359	.531	-.577
	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	.571	.359	1.000	.468	-.446
	Pengangguran	.687	.531	.468	1.000	.356
	Inflasi	-.475	-.577	-.446	.356	1.000
Sig. (1-tailed)	Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013		.018	.025	.005	.040
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	.018		.054	.000	.012
	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	.025	.054		.043	.098
	Pengangguran	.005	.000	.043		.066
	Inflasi	.040	.031	.098	.066	
N	Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013	10	10	10	10	10
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10	10	10	10	10
	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	10	10	10	10	10
	Pengangguran	10	10	10	10	10
	Inflasi	10	10	10	10	10

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pengangguran <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 <sup>a</sup>	.721	.709	1.35374	1.751

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pengangguran

b. Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.694	4	2.924	51.595	.007 <sup>a</sup>
	Residual	9.163	5	1.833		
	Total	20.857	9			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pengangguran

b. Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-22.358	17.024		-1.313	.246		
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	.331	.135	.283	2.813	.035	.480	2.109
	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	.310	.148	.265	2.729	.042	.458	2.182
	Pengangguran	.435	.105	.394	3.546	.013	.561	1.440
	Inflasi	-.214	.162	-.172	-2.683	.046	.391	4.448

a. Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pengangguran	Inflasi
1	1	4.699	1.000	.00	.00	.00	.00	.01
	2	.192	4.950	.00	.00	.02	.00	.33
	3	.093	7.121	.00	.00	.00	.04	.40
	4	.016	17.307	.00	.04	.56	.00	.19
	5	.000	104.354	1.00	.76	.42	.76	.08

a. Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013

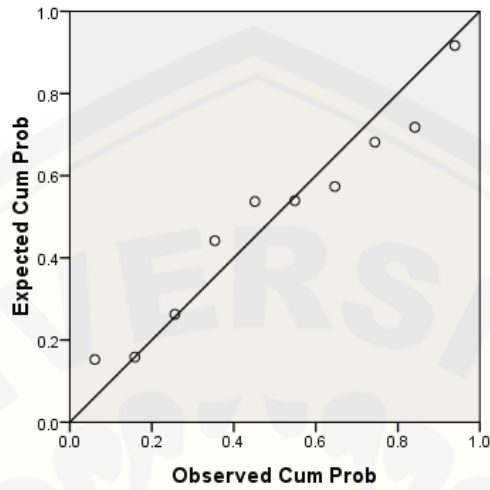
**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5.0387	8.0985	6.5470	1.13990	10
Std. Predicted Value	-1.323	1.361	.000	1.000	10
Standard Error of Predicted Value	.749	1.205	.950	.126	10
Adjusted Predicted Value	3.6702	9.2181	6.6269	1.49630	10
Residual	-1.38859	1.87229	.00000	1.00902	10
Std. Residual	-1.026	1.383	.000	.745	10
Stud. Residual	-1.456	1.965	-.019	1.046	10
Deleted Residual	-2.79815	3.77978	-.07987	2.00109	10
Stud. Deleted Residual	-1.716	3.684	.099	1.516	10
Mahal. Distance	1.858	6.230	3.600	1.198	10
Cook's Distance	.001	.787	.197	.254	10
Centered Leverage Value	.206	.692	.400	.133	10

a. Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013

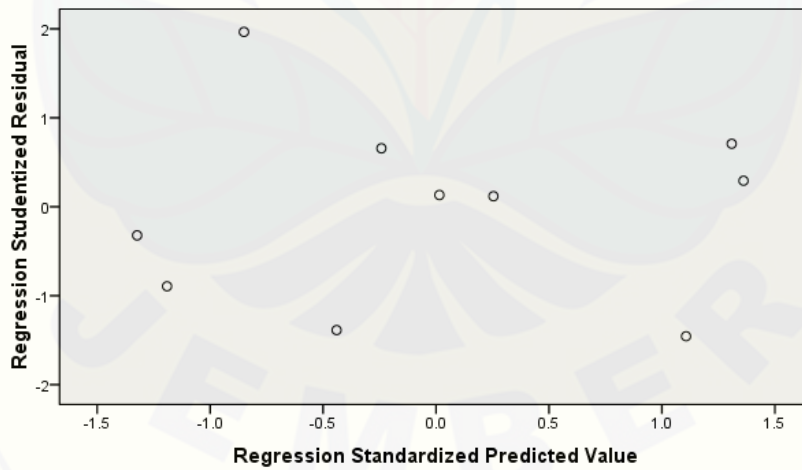
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013



Scatterplot

Dependent Variable: Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013



NPART TESTS

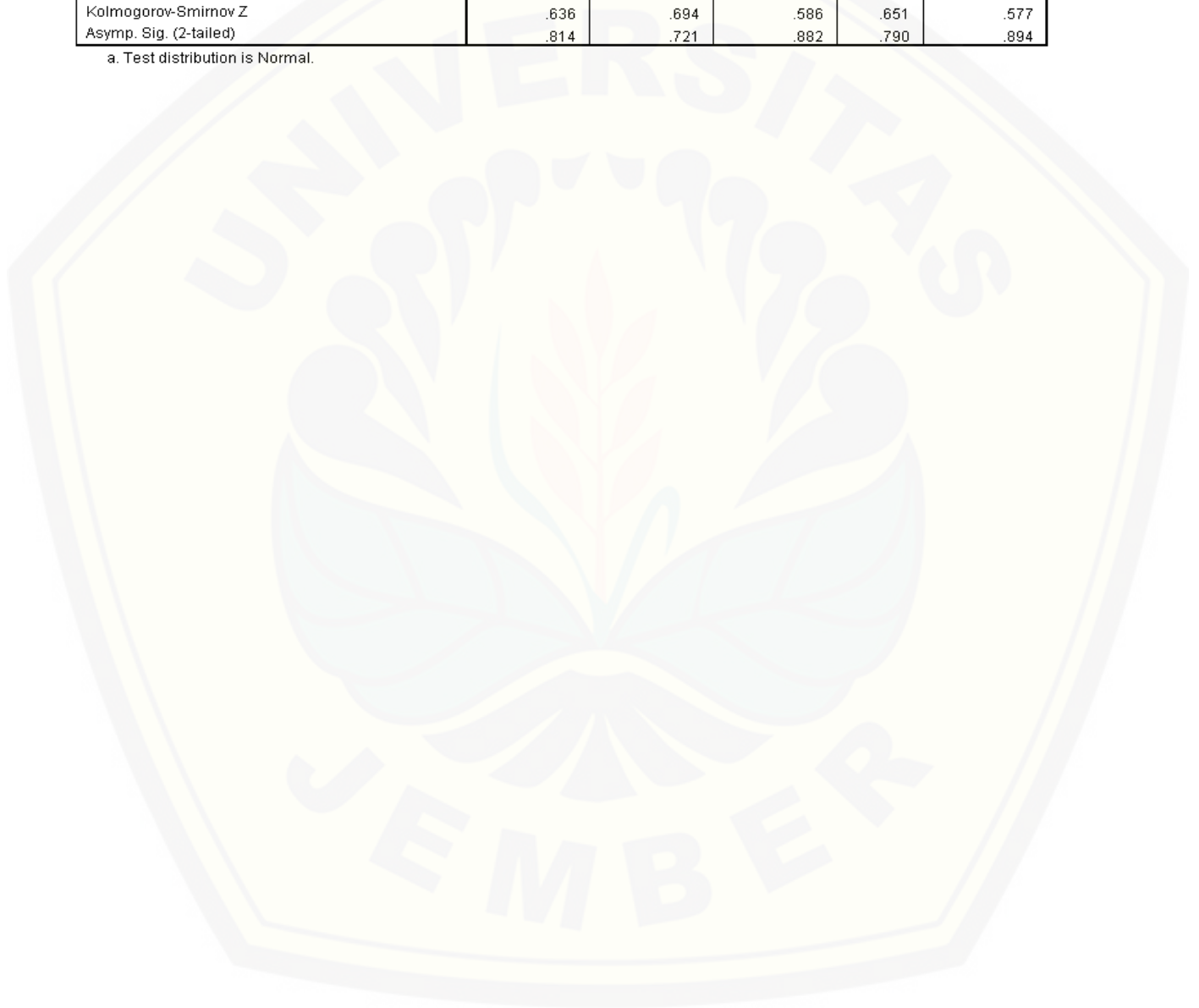
/K-S (NORMAL)=X.1 X.2 X.3 X.4 Y

/MISSING ANALYSIS.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pengangguran	Inflasi	Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 - 2013
N		10	10	10	10	10
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	5.8639	13.1391	8.6800	.5584	7.3470
	Std. Deviation	.92214	9.83443	3.02501	.27963	2.32726
Most Extreme Differences	Absolute	.201	.219	.185	.206	.182
	Positive	.201	.219	.174	.206	.182
	Negative	-.165	-.208	-.185	-.147	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		.636	.694	.586	.651	.577
Asymp. Sig. (2-tailed)		.814	.721	.882	.790	.894

a. Test distribution is Normal.



## LAMPIRAN 3. TABEL t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

LAMPIRAN 4. TABEL F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89